

Judul : Pemutihan Bantu Warga Tak Mampu
Tanggal : Jumat, 24 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Tunggakan BPJS Kesehatan Pemutihan Bantu Warga Tak Mampu

ANGGOTA Komisi IX DPR Netty Prasetyani memuji kebijakan pemutihan tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan senilai lebih dari Rp 10 triliun. Kebijakan itu bertujuan memastikan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Netty mengatakan, kebijakan tersebut harus dirancang dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi peserta yang taat membayar iuran. "Peserta yang benar-benar tidak mampu tentu harus dibantu. Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan ini tidak menurunkan semangat kepatuhan peserta lain," ujar Netty di Jakarta, kemarin.

Legislator PKS itu menjelaskan, tunggakan iuran sebagian besar berasal dari peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBPU) yang belum membayar secara rutin. Kondisi ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem pembayaran, terutama bagi pekerja sektor informal yang tidak memiliki mekanisme pemotongan otomatis.

Dia bilang, membenahan sistem harus disertai peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya iuran kesehatan. Pasalnya, masalah tunggakan bukan hanya soal kemampuan ekonomi, tapi juga kesadaran dan literasi. Pemerintah bersama BPJS perlu memperkuat edukasi publik.

"Sehingga masyarakat memahami bahwa iuran adalah bentuk gotong royong menjaga kesehatan bersama," kata Legislator dari Dapil Jabar VIII itu.

Lebih lanjut, dia mendukung langkah Pemerintah menanggung sebagian beban bagi kelompok rentan, dengan catatan

verifikasi data harus ketat dan transparan. Proses penentuan peserta yang mendapat pemutihan kudu dilakukan secara adil dan akuntabel.

Tujuannya agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan kebijakan tersebut. "Pemerintah harus memastikan tidak ada potensi penyalahgunaan atau *fraud* dalam proses penghapusan tunggakan," tegasnya.

Anggota Komisi IX Nuroji turut mendukung rencana tersebut sebagai langkah positif dalam kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini tengah lesu. Kebijakan tersebut akan memberikan dampak baik bagi masyarakat. "Salah satunya meringankan beban masyarakat yang selama ini memiliki tunggakan BPJS sehingga kepesertaannya tidak aktif," jelas Nuroji.

Politikus Partai Gerindra itu juga mengatakan, pemutihan tunggakan iuran membuat masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan. Apalagi bagi masyarakat yang dalam kondisi sakit namun kepesertaan BPJS kesehatannya tidak aktif karena memiliki tunggakan iuran.

"Orang sakit tentu membutuhkan pengobatan. Jadi kalau mereka kepesertaan BPJSnya aktif tentunya akan bisa mendapatkan layanan kesehatan," katanya.

Dia juga mendorong adanya pembaharuan data kepesertaan BPJS. Terutama untuk masyarakat yang selama ini terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). "Jangan sampai orang yang dulunya tidak mampu, sekarang menjadi mampu masih terdaftar PBI," tegasnya. ■ PYB